

ANALISIS POTENSI EKONOMI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI BOGOR BARAT

Teni Marfiani¹, Sri Hartoyo², Manuwoto

Alumni Magister Profesional Manajemen Pembangunan Daerah.
Jln. Abiyasa Raya No.6 Indraprasta Bogor Tlp. 0251-8319123. E-mail: teni.marfiani@gmail.com

² Staff Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi, FEM IPB, Gd. Wing Andi Hakim Nasution
Lt. 3 Kampus IPB Darmaga Bogor. Tlp. 0251-8626 602. E-mail: ilmuekon@ipb.ac.id.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the readiness of the potential economy at the developmental areas in West Bogor and to formulate a developmental economy strategy to actualize in the implementation of autonomy development. In general, the result showed that the western region of Bogor has an economic potential that can be developed, therefore it can be made as one of the main factors in the recommendation to become an autonomous district. Western Bogor region has a few growth centers to draw the growth of the region. Growth and service centers are still accumulating in urban areas resulting in a gap caused by the intensity of linkages between urban areas and rural areas in which are relatively limited.

The selected strategy priorities are: (1) the development of industries that support the agricultural aspect (agro-industry) as an effort to optimize the utilization and managing sustainable natural resources by utilizing the potentials Bogor Regency has (economic conditions, government policies Bogor Regency, geographical location) as well as cooperation with private sector / other, (2) Finding and promoting the image of commodity and regional superior products that provide value-added (GDP and PAD) for the local community using the criteria of potential value-added direct a commodity / product for poor families, and (3) creating a conducive business climate to support local capacity building by expanding the local tax base and expand the productive sectors of the economy of the people.

Implications of policy directed as social, cultural, political, institutional, or spatial aspects of the development budget and policy. Furthermore, the basic sector analysis should be done at sub-district unit so that it can be seen a leading sector per district based on income (GDP) per district.

Keywords: *Growth and service centers, local economic potential, regional development.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk didalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Untuk mencapai

sasaran pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Hal tersebut disebabkan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki yang pada umumnya berbeda antar satu dengan daerah lainnya. Oleh karenanya, informasi daerah yang lengkap, akurat dan terkini sangat diperlukan untuk

mewujudkan sasaran pembangunan tersebut.

Tantangan yang dihadapi kabupaten terutama untuk daerah otonom yang baru adalah peningkatan pendapatan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya di daerah. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang tepat sangat diperlukan. Arah penentuan kebijakan dan strategi tersebut adalah tercapainya kriteria-kriteria prioritas pembangunan berupa penurunan bentuk-bentuk ketimpangan, kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan daerah.

Salah satu kabupaten yang akan melakukan pemekaran wilayah adalah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, kajian pembangunan daerah ini dimaksudkan untuk mengenal dan menggali kesiapan suatu wilayah sebagai rekomendasi pembentukan daerah baru khususnya di bidang ekonomi, kasus di Bogor Barat. Berdasarkan hal itu, **“bagaimana kesiapan potensi ekonomi bogor barat dan strategi pembangunan ekonominya mampu menempatkan daerah tersebut memiliki kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan?”** menjadi pertanyaan utama dalam kajian ini.

Perumusan Masalah

Pembangunan yang telah dilaksanakan menyebabkan disparitas ekonomi di wilayah Bogor Barat, sementara potensi ekonomi di wilayah tersebut merupakan kekuatan internal dalam proses pembangunan. Potensi ekonomi di wilayah Bogor Barat dapat dioptimalkan dengan suatu perencanaan strategis. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menggali potensi suatu daerah adalah dengan memberikan kesempatan untuk mengelola sendiri potensi ekonominya. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu

kajian, khususnya kajian ekonomi, agar daerah tersebut siap untuk mencapai suatu kemandirian dalam pembangunan.

Menelaah pembangunan dengan memperhatikan persoalan yang terjadi di masing-masing kecamatan meliputi penelaahan terhadap perbedaan keadaan potensi ekonomi serta pengaruhnya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Perekonomian daerah dipengaruhi oleh perekonomian daerah lain sehingga untuk merumuskan kebijakan ekonomi di Bogor Barat, identifikasi keadaan dan kondisi perekonomiannya sangat diperlukan. Kajian ini difokuskan pada potensi ekonomi yang meliputi potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia yang dicerminkan oleh karakteristik tenaga kerja, tingkat pendapatan daerah, serta sarana dan prasarana pembangunan. Dengan demikian, permasalahan spesifik yang dapat dikemukakan dalam kajian ini adalah “potensi ekonomi mana yang merupakan potensi unggulan sehingga dapat menjadi penggerak perekonomian di Bogor Barat?”.

Penentuan arah pembangunan daerah selain mempertimbangkan penyebaran alokasi kegiatan-kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk penyebaran pusat pelayanan, juga mempertimbangkan perbedaan penyebaran potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki suatu daerah. Dari penyebaran tersebut dapat diketahui ketimpangan spasial yang terjadi. Kecamatan yang kurang berkembang diprioritaskan dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sedangkan kecamatan yang berkembang diprioritaskan karena wilayah tersebut memiliki potensi pertumbuhan untuk tumbuh di atas kekuatan sendiri dan dapat mendorong pertumbuhan wilayah belakangnya. Hal itu secara tidak langsung dapat meningkatkan interaksi spasial baik internal maupun eksternal yang mendukung perkembangan daerah tersebut.

Terkait dengan penanggulangan ketimpangan pembangunan, "bagaimana penyebaran sumberdaya alam, fasilitas dan prasarana pembangunan di daerah Bogor Barat, sebagai pertimbangan dalam menentukan prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan?" merupakan pertanyaan spesifik yang kedua yang menarik untuk dikaji dalam kajian pembangunan daerah ini.

Penentuan prioritas pembangunan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi hasil dari pembangunan itu sendiri. Prioritas atau kebijakan yang salah arah akan menyebabkan ketidakselarasan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk ketimpangan sektoral, kelompok, teknologi, maupun ketimpangan spasial (antar kecamatan). Secara umum, rencana strategis sangat bermanfaat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bogor terutama untuk mengatasi disparitas pembangunan di Wilayah Pembangunan Bogor Barat. Begitupun dalam rencana pembentukan Kabupaten Bogor Barat, penentuan arah pembangunan akan menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Usulan Bogor Barat. Terkait dengan hal tersebut, permasalahan spesifik selanjutnya dalam kajian ini adalah "bagaimana rumusan alternatif strategi dan prioritas pembangunan ekonomi untuk mendukung kemandirian di Bogor Barat?".

Tujuan

Tujuan umum dari kajian ini adalah untuk menganalisis kesiapan potensi ekonomi di Wilayah Pembangunan Bogor Barat serta merumuskan strategi pembangunan ekonominya sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan spesifiknya adalah:

1. Mengidentifikasi sektor-sektor basis yang akan diprioritaskan sebagai sektor

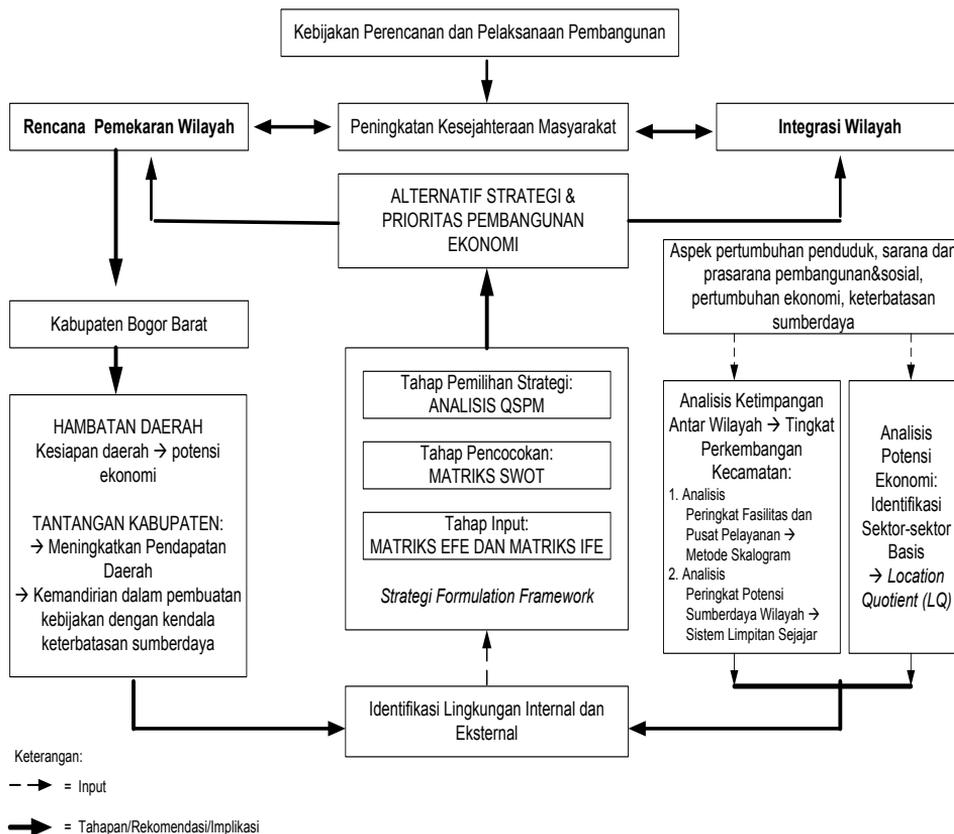
unggulan sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi di Bogor Barat.

2. Merancang berbagai alternatif strategi dan prioritas pembangunan ekonomi di Bogor Barat.

METODE PENELITIAN

Kesiapan potensi ekonomi di Wilayah Pembangunan Bogor Barat serta rumusan strategi pembangunan ekonominya untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui analisis pusat pertumbuhan dan pelayanan serta potensi sumberdaya wilayah Bogor Barat; identifikasi sektor-sektor basis yang akan diprioritaskan sebagai sektor unggulan; serta merancang berbagai alternatif strategi dan prioritas pembangunan ekonomi di Bogor Barat. Gambar 1 menunjukkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan dalam kajian ini antara lain metode deskriptif dan metode kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui kondisi daerah Bogor Barat dan tingkat perkembangan hasil pembangunannya. Metode kuantitatif antara lain berupa analisis hirarki pusat pelayanan dengan metode skalogram, dan analisis sistem limpitan sejajar dan selanjutnya metode Location Quotient (LQ) untuk mengetahui potensi ekonomi kecamatan-kecamatan di daerah Bogor Barat. Analisis deskriptif untuk menggambarkan perkembangan hasil pembangunan meliputi tabulasi, peringkasan, dan penyajian dalam bentuk grafik atau gambar-gambar serta perhitungan ukuran deskripsinya. Variabel yang diukur dari data yang tersedia antara lain variabel dalam aspek sosio-demografi dan ekonomi (Tabel 1 dan Tabel 2).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tabel 1. Metode Analisis Data dan Data yang Digunakan dalam Kajian Pembangunan Daerah

Metode Analisis	Tujuan	Data yang Diperlukan	Sumber Data
Location Quotient (LQ)	Mengidentifikasi sektor-sektor basis yang akan diprioritaskan sebagai sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak ekonomi di Bogor Barat	PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan sektoral menurut lapangan usaha	BPS Kabupaten Bogor dan Dinas-dinas terkait
Metode Skalogram	Menganalisis hirarki pusat pertumbuhan dan pelayanan.	Jumlah penduduk dan sarana prasarana pembangunan	BPS Kabupaten Bogor
Sistem Limpitan sejar:	Menetapkan wilayah-wilayah pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan:		
<ul style="list-style-type: none"> Analisis Hirarki Potensi Sumberdaya Analisis Hirarki fasilitas sosial ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Menganalisis tingkat ketimpangan antar wilayah yang disebabkan oleh perbedaan penyebaran potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki suatu daerah Menganalisis tingkat ketimpangan antar wilayah yang disebabkan oleh alokasi kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya (ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi). 	<p>Data potensi sumberdaya wilayah yang meliputi potensi sumberdaya alam seperti pertanian, industri dan lain-lain</p> <p>Data ketersediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi</p>	<p>BPS Kabupaten Bogor dan dinas-dinas terkait</p> <p>Bappeda Kabupaten Bogor</p>

Tabel 2. Metode Perancangan Program dan Data yang Digunakan untuk Merumuskan Strategi Pembangunan Daerah

Metode Analisis	Tujuan	Data yang Diperlukan	Sumber Data
Matriks IFE dan EFE	Menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal pembangunan wilayah	Faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman.	Bappeda Kabupaten Bogor
Analisis SWOT	Merumuskan strategi pembangunan daerah dengan melihat faktor-faktor internal dan eksternal.	Faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi dalam matriks IFE dan EFE	
Analisis QSPM	Menentukan prioritas alternatif strategi pembangunan dengan melihat kaitan antara faktor-faktor strategis internal dan eksternal dengan alternatif strategi.	Hasil rumusan alternatif strategi yang diperoleh dari matriks SWOT	Responden yang dianggap berpengaruh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara administratif Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan dan 427 desa. Wilayah Bogor Barat terdiri atas Kecamatan Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, Rumpin, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Tenjo, dan Parung Panjang. Sementara, wilayah yang diusulkan menjadi Kabupaten Bogor Barat meliputi 20 kecamatan terdiri dari 13 kecamatan di Wilayah Pembangunan Bogor Barat ditambah tujuh Kecamatan di Wilayah Bogor Tengah: Dramaga, Ciomas, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng, dan Gunung Sindur.

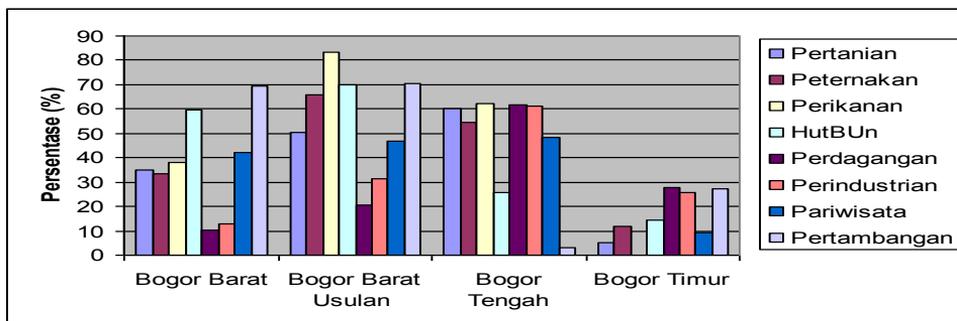
Jumlah penduduk total di Wilayah Pembangunan Bogor Barat pada tahun 2004 adalah 1.079.572 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.120 jiwa/km², sedangkan di kecamatan-kecamatan yang diusulkan menjadi Kabupaten Bogor Barat penduduknya berjumlah 1.585.078 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.356 jiwa/km² (BPS Kabupaten Bogor, 2005). Perubahan yang cukup besar terjadi pada tahun 2006.

Menurut Bappeda Kabupaten Bogor (2006), pada tahun 2006 Jumlah penduduk total di Wilayah Pembangunan Bogor Barat adalah 1.280.391 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.536 jiwa/km², sedangkan di Wilayah Usulan Bogor Barat penduduknya berjumlah 1.886.540 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.146 jiwa/km². Struktur mata pencaharian penduduk di wilayah Bogor Barat didominasi oleh sektor pertanian.

Kabupaten Bogor memiliki nilai rasio jumlah Keluarga Pra Sejahtera terhadap jumlah keluarga total sebesar 0,13 yang artinya dalam setiap 100 keluarga terdapat 13 Keluarga Pra Sejahtera. Wilayah Pembangunan Bogor Barat memiliki nilai rasio 0,19 yang berarti dalam setiap 100 orang keluarga di Bogor Barat terdapat 19 Keluarga Pra Sejahtera. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan kondisi Wilayah Usulan Bogor Barat yang memiliki nilai rasio 0,18. Dengan demikian, terdapat 18 Keluarga Pra sejahtera untuk setiap 100 keluarga di Wilayah Usulan Bogor Barat. Jika dibandingkan dengan kondisi di wilayah Bogor Tengah dan Bogor Timur, jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Wilayah Barat relatif lebih banyak. Nilai rasio jumlah Keluarga Pra sejahtera terhadap

jumlah Keluarga di Bogor Tengah dan Bogor Timur Masing-masing 0,07 dan 0,13. Potensi sumberdaya wilayah di Kabupaten Bogor ditunjukkan oleh Gambar 2. Selanjutnya, Potensi perindustrian dan perdagangan yang ditunjukkan oleh produk daerah pada usaha kecil, mikro dan menengah di masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 3.

Kabupaten Bogor Barat (Wilayah Usulan Bogor Barat). Sektor yang dikaji dalam peringkat potensi sumberdaya wilayah ini adalah sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pertambangan dan kependudukan.



Gambar 2. Persentase Potensi Sumberdaya Wilayah di Kabupaten Bogor

Sumber: BPS Kabupaten Bogor, 2005 (Diolah)

Ketimpangan Antarwilayah Pembangunan di Bogor Barat

a) Ketimpangan Sumberdaya Pembangunan Berdasarkan Analisis Hirarki Potensi Sumberdaya Wilayah Kabupaten Bogor

Ketimpangan sumberdaya pembangunan ditunjukkan oleh hasil analisis hirarki potensi sumberdaya wilayah. Dalam analisis hirarki potensi sumberdaya ini satuan penelitian yang digunakan adalah wilayah kecamatan. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Namun yang akan dibahas secara spesifik hanya Wilayah Pembangunan Bogor Barat yang terdiri dari 13 kecamatan serta tujuh kecamatan lainnya yang tidak termasuk ke dalam daerah pembangunan Bogor Barat tetapi diusulkan menjadi bagian dari

b) Ketimpangan Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Analisis Hirarki Fasilitas Sosial Ekonomi di Kabupaten Bogor

Ketersediaan fasilitas pelayanan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan suatu wilayah dan penduduknya sehingga ketidakmerataan penyebarannya menjadi indikator terdapatnya ketimpangan kesejahteraan antar kecamatan. Tingkat ketersediaan dan penyebaran fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Bogor yang dibedakan menjadi fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, peribadatan, pariwisata, serta perhubungan dan komunikasi ditunjukkan oleh analisis hirarki fasilitas sosial ekonomi.

Tabel 3. Produk Daerah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bogor Tahun 2006

No.	Kecamatan	Produk Daerah
1.	Nanggung	Hasil perkebunan dan kehutanan
2.	Leuwiliang	Bata Merah
3.	Leuwi Sadeng	Pandai besi, bunga kering
4.	Pamijahan	Perikanan (Udang Air Tawar)
5.	Cibungbulang	Makanan, konveksi pakaian muslim, tas, jaket
6.	Ciampea	Tas. Ikan patin
7.	Tenjolaya	Pertanian dan perikanan
8.	Rumpin	Split, Batu belah, Tras, Pasir, Telur ayam, Bambu
9.	Cigudeg	Hasil tambang (split, tras, andelit)
10.	Sukajaya	Hasil hutan dan perkebunan
11.	Jasinga	Golok dan alat pertanian
12.	Tenjo	Dodol, Emping melinjo
13.	Parung Panjang	Kopi, madu, tas
14.	Dramaga	Sepatu Balita, Manisan, Replika pesawat
15.	Ciomas	Sepatu dan Sandal
16.	Kemang	Peternakan, kue basah&kering, keset, sepatu, sandal
17.	Rancabungur	Tanaman hias, lidah buaya
18.	Parung	Konveksi, perikanan, pabrik tahu
19.	Ciseeng	Perikanan (Ikan hias, lele, gurame), konveksi pakaian dalam
20.	Gunung Sindur	Tanaman hias anggrek dan lidah buaya
21.	Tamansari	Sepatu, Sandal, Tanaman hias
22.	Cijeruk	Manisan pala, sirih instant, ayam ras, besek
23.	Cigombong	Konveksi rajutan, aneka kripik
24.	Caringin	Konveksi bordir
25.	Ciawi	Sepatu, sepatu bola, boneka, makanan tradisional
26.	Cisarua	Susu sapi, Rajutan
27.	Megamendung	Kantong Kertas, Bilik Bambu, Bunga potong, Tanaman hias, aneka makan dari pisang, tas kantor
28.	Sukaraja	Sagu Kasar, tapioka, perikanan lele, dendeng lele
29.	Babakan Madang	Kue semprong, warung makanan, makanan ringan
30.	Citeureup	Kerajinan logam (crom), <i>accessories</i> mobil, alat-alat rumah tangga, Alat-alat/ kebutuhan rumah sakit
31.	Cibinong	Makanan ringan (keripik singkong), kerajinan tangan
32.	Bojong Gede	Konveksi pakaian dalam, dodol
33.	Tajur Halang	Buah-buahan
34.	Sukamakmur	Aci singkong, meubelair, anyaman bilik
35.	Cariu	Sepatu dan sandal, makanan (sirup madu)
36.	Tanjungsari	Tas
37.	Jonggol	Makanan (kacang garing, roti, keripik, tahu, opak)
38.	Cileungsi	Jahe, ginseng, kopi instant; minuman sari buah
39.	Klapanunggal	Hasil tambang (split, tras, andelit), makanan, konveksi
40.	Gunung Putri	Kue kering

Sumber: Disperindag Kabupaten Bogor dan Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, 2006

Analisis Sistem Limpitan sejajar

Sistem limpitan sejajar merupakan gabungan antara sistem hirarki potensi sumberdaya wilayah dan penyebaran fasilitas sosial ekonominya. Potensi sumberdaya yang berbeda-beda antar kecamatan memacu untuk dilaksanakannya pengembangan wilayah secara terpadu melalui spesialisasi pada sumberdaya yang dimiliki sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Pusat Pertumbuhan dan Penyebaran Fasilitas di Wilayah Bogor Barat

Pada wilayah Kabupaten Usulan Bogor Barat termasuk di dalamnya Wilayah Pembangunan Bogor Barat, kecamatan yang

menempati hirarki tertinggi dengan jumlah jenis dan jumlah unit sarana prasarana terbanyak adalah Kecamatan Ciomas. Di samping itu terdapat juga kecamatan yang menempati hirarki terendah dengan jumlah jenis dan jumlah unit sarana prasarana yang paling sedikit yaitu Kecamatan Rancabungur.

Sesuai dengan Tabel skalogram Kabupaten Usulan Bogor Barat, pusat pengembangan yang mempunyai fasilitas paling lengkap dibandingkan dengan kecamatan lain adalah Kecamatan Kemang dan Kecamatan Ciampea dengan 27 jenis (71,05 persen) sarana prasarana. Kecamatan Leuwisadeng merupakan kecamatan yang memiliki jenis prasarana paling rendah yaitu berjumlah 12 jenis (31, 58 persen) prasarana.

Tabel 4. Hirarki Aktual Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan di Bogor Barat Tahun 2005.

Wilayah Pembangunan	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Jenis	Jumlah Unit	Peringkat
Bogor Barat	Pamijahan	113.548	22	321	10
Bogor Barat	Ciampea	109.508	27	405	4
Bogor Barat	Cibungbulang	107100	25	618	2
Bogor Barat	Cigudeg	104.376	23	344	8
Bogor Tengah	Ciomas	100.521	24	848	1
Bogor Barat	Rumpin	98.275	21	382	5
Bogor Barat	Jasinga	93.799	23	380	6
Bogor Barat	Leuwiliang	89.189	26	446	3
Bogor Barat	Parung Panjang	83.533	24	355	7
Bogor Tengah	Ciseeng	80.775	22	203	16
Bogor Tengah	Dramaga	75.853	25	337	9
Bogor Barat	Nanggung	72.970	20	252	15
Bogor Tengah	Kemang	69.945	27	280	13
Bogor Tengah	Parung	69.692	25	315	11
Bogor Tengah	Gunung Sindur	66.800	25	266	14
Bogor Barat	Leuwi Sadeng	55.649	12	179	18
Bogor Barat	Tenjo	55.525	19	293	12
Bogor Barat	Sukajaya	50.610	17	157	19
Bogor Barat	Tenjolaya	45.445	14	191	17
Bogor Tengah	Rancabungur	41.965	18	139	20

Kecamatan Ciomas menempati urutan pertama dalam hirarki pusat pelayanan untuk jumlah unit sarana prasarana pembangunan. Jumlah sarana prasarana di Kecamatan Ciomas adalah 848 unit dan terdiri atas 24 jenis. Urutan berikutnya setelah Kecamatan Ciomas adalah Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Leuwiliang dengan jumlah unit sarana masing-masing berjumlah 618 unit dan 448 unit. Kecamatan dengan hirarki pusat pelayanan terendah adalah Kecamatan Rancabungur dengan jumlah sarana prasarana 139 unit dan 18 jenis.

Oleh karena itu, dari skalogram tersebut dapat disimpulkan bahwa pusat pelayanan atau pusat pengembangan wilayah utama Kabupaten Usulan Bogor Barat adalah Kecamatan Ciomas dan untuk Wilayah Pembangunan Bogor barat adalah Kecamatan Cibungbulang. Kecamatan Rancabungur merupakan kecamatan yang kekurangan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, praktek dokter

gigi, dokter swasta dan dokter spesialis; serta fasilitas ekonomi seperti pasar, pasar swalayan, restoran, Bank Perkreditan Rakyat, dan pegadaian. Begitupun dengan sarana ibadah untuk masyarakat non-muslim dan sarana pariwisata yang masih belum tersedia di Kecamatan Rancabungur.

Selain menunjukkan hirarki pusat pengembangan dan ketersediaan jenis sarana prasarana pelayanan, metode skalogram juga dapat menunjukkan penyebaran fasilitas-fasilitas pelayanan di suatu wilayah. Derajat penyebaran fasilitas pelayanan dapat dilihat dari banyaknya jumlah kecamatan yang memiliki jenis fasilitas tersebut.

Analisis Potensi Perekonomian Lokal di Wilayah Bogor Barat

Hasil perhitungan LQ di Wilayah Pembangunan Bogor Barat memberikan gambaran bahwa pada tahun 2002 sampai dengan 2005 terdapat lima sektor unggulan. Sektor-sektor tersebut adalah sektor

Tabel 5. Jenis Fasilitas Pelayanan Berdasarkan Derajat Penyebarannya Di Kabupaten Usulan Bogor Barat Tahun 2005

Derajat Penyebaran	Jenis Fasilitas	
Tinggi (≥70%)	TK/RA dan TPA	Klinik KB
	Mesjid	Puskesmas
	SD	Praktek Dokter Umum
	Mushola	SLTA
	Madrasah Ibtidaiyah	Pesantren
	SLTP	Madrasah Aliyah
	Desa	Bidan Praktek Swasta
	Madrasah Tsanawiah	Puskesmas Pembantu
	Sub Terminal Angkot	Tempat Rekreasi
Sedang (35% - 70%)	Koperasi	Pasar
	Praktek Dokter Gigi	Puskesmas Keliling
	Pasar Swalayan/Toserba	Kantor Pos/KP Pembantu
Rendah (≤35%)	Praktek Dokter Spesialis	Rumah Sakit Bersalin
	Gereja Katolik	Restoran
	BPR Pemda	Pegadaian
	Vihara	Gereja Kristen
	Hotel/Penginapan	Terminal Bus
	Pura	Stasiun Kereta Api
	Rumah Sakit	

pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Sektor-sektor basis ini berpotensi untuk mengekspor komoditi yang dihasilkan ke luar wilayah. Sektor lain yang nilai LQ-nya kurang dari satu merupakan sektor bukan basis sehingga hanya mampu menghasilkan komoditi untuk dipasarkan secara lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Besarnya koefisien LQ dari sektor-sektor perekonomian tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Untuk sektor yang termasuk sektor basis, koefisien pengganda terbesar adalah sektor jasa-jasa. Nilai koefisien pengganda sebesar 18,85 mengindikasikan bahwa jika pendapatan pada sektor jasa-jasa di Bogor Barat meningkat sebesar sepuluh ribu rupiah maka PDRB Bogor Barat akan meningkat sebesar 188.466,08 rupiah. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang memiliki koefisien pengganda terbesar pada kelompok sektor

bukan basis. Nilai koefisien pengganda sebesar 168,27 berarti bahwa setiap sepuluh ribu rupiah pendapatan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan akan menghasilkan PDRB Bogor Barat sebesar 1.682.693,65 rupiah.

Perumusan Alternatif Strategi Pembangunan Ekonomi Wilayah Bogor Barat

Perumusan alternatif strategi pembangunan ekonomi di Bogor Barat melalui tiga tahap analisis yaitu tahap input (Matriks IFE dan EFE), tahap pencocokan (Matriks SWOT), dan tahap pemilihan strategi (Analisis QSPM).

Keterkaitan Antara Alternatif Strategi Pembangunan Ekonomi dan Identifikasi Wilayah Bogor Barat

Kaitannya dengan perumusan alternatif strategi pembangunan ekonomi di Wilayah Bogor Barat, terlebih dahulu perlu dilakukan suatu studi rencana pembangunan wilayah dengan lingkup kegiatan identifikasi wilayah. Strategi pembangunan

Tabel 6. Nilai Location Quotient (LQ) Wilayah Pembangunan Bogor Barat Dan Peranan PDRB Sektoral Wilayah Pembangunan Bogor Barat Terhadap Kabupaten Bogor Tahun 2002 – 2005

Lapangan Usaha		KONTRIBUSI PDRB (%)				LQ			
		2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	18,87	17,07	16,32	15,65	2,68	2,68	2,70	2,67
2.	Pertambangan & Penggalian	7,59	8,22	7,24	6,11	4,86	5,10	5,12	5,09
3.	Industri Pengolahan	34,32	34,73	35,34	35,84	0,58	0,58	0,59	0,60
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	6,95	6,99	7,05	7,37	1,86	1,86	1,87	1,93
5.	Bangunan	0,65	0,64	0,63	0,91	0,20	0,20	0,19	0,28
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	25,41	25,94	26,56	27,08	1,58	1,59	1,61	1,61
7.	Pengangkutan & Komunikasi	1,04	1,06	1,09	1,14	0,39	0,39	0,39	0,41
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,51	0,52	0,54	0,59	0,29	0,30	0,31	0,32
9.	Jasa-Jasa	4,65	4,82	5,23	5,31	1,06	1,09	1,17	1,21
PDRB Bogor Barat		16,22	15,72	15,19	14,66				

Sumber: Bappeda Kabupaten Bogor, 2006 (Diolah)

ekonomi tersebut harus mempertimbangkan faktor persebaran lokasi potensi sumberdaya alam, intensitas kegiatan perekonomian yang ada, ketersediaan sarana dan prasarana wilayah, serta prioritas pengembangan. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis perumusan strategi pembangunan ekonomi terlebih dahulu dilakukan analisis sektor unggulan, analisis hirarki potensi sumberdaya wilayah, dan analisis hirarki fasilitas pelayanan yang dimaksudkan agar pemanfaatan sumberdaya lokal lebih optimal.

Saat ini, keberadaan kecamatan-kecamatan yang termasuk kategori maju di Kabupaten Bogor masih terpusat di wilayah tengah. Peran Kecamatan-kecamatan maju tersebut sebagai *core* ternyata belum menunjukkan adanya interaksi yang saling mendukung. Hal ini terlihat dari relatif sedikitnya kecamatan di Wilayah Bogor Barat yang menjadi daerah maju. Untuk meningkatkan intensitas keterkaitan antarkecamatan, maka sebaiknya di bagian barat Kabupaten Bogor dibuat suatu pusat pertumbuhan dan pelayanan yang baru. Hal tersebut didukung juga oleh potensi sumberdaya wilayah yang besar. Begitupun dengan kecamatan yang ada sekarang maupun yang diusulkan menjadi Kabupaten Bogor Barat dari segi jumlah sudah substansial. Dengan demikian, perkembangan pusat pertumbuhan yang baru diharapkan dapat menyeimbangkan kesenjangan antarkecamatan perkotaan dan pedesaan.

Pembangunan wilayah harus memperhatikan potensi sumberdaya yang dimiliki. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa masing-masing wilayah kecamatan yang ada di wilayah barat Kabupaten Bogor mempunyai perbedaan dalam ketersediaan potensi sumberdaya alam maupun ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi. Berdasarkan pengkategorian yang

telah dilakukan maka pada tahun 2005 di Wilayah Pembangunan Bogor Barat terdapat tujuh kecamatan (53,85 persen) wilayah kaya dan masing-masing tiga kecamatan (23,08 persen) wilayah sedang dan wilayah miskin. Hasil tersebut berbeda jika analisis dilakukan dengan memasukkan tujuh kecamatan di wilayah Bogor Tengah ke dalam wilayah Bogor Barat. Di Wilayah Usulan Bogor Barat, Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah sedang jumlahnya relatif lebih banyak yaitu sembilan kecamatan (45 persen) jika dibandingkan dengan wilayah kaya yang berjumlah tujuh kecamatan (35 persen).

Berdasarkan ketersediaan dan penyebaran fasilitas sosial ekonomi, Wilayah Pembangunan Bogor Barat sebagian besar merupakan wilayah berkembang yaitu sekitar 61,54 persen dari jumlah kecamatan yang ada di Bogor Barat. Jumlah kecamatan yang termasuk wilayah maju hanya berjumlah satu kecamatan (7,69 persen) sedangkan wilayah yang termasuk wilayah tertinggal berjumlah empat kecamatan (30,77 persen). Relatif lebih banyaknya jumlah wilayah berkembang juga terlihat di Wilayah Usulan Bogor Barat. Di Wilayah tersebut, kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah berkembang berjumlah 12 kecamatan (60 persen) sedangkan kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah maju dan tertinggal masing-masing berjumlah satu kecamatan (5 persen) dan tujuh kecamatan (35 persen).

Penggabungan antara hirarki potensi sumberdaya wilayah dan hirarki fasilitas sosial ekonomi menghasilkan analisis sistem limpitan sejajar. Berdasarkan analisis limpitan sejajar, di Wilayah Pembangunan Bogor Barat pada tahun 2005 terdapat enam kecamatan (46,15 persen) yang tergolong kategori wilayah potensial, tiga kecamatan (23,08 persen) wilayah strategis, dan empat kecamatan termasuk ke dalam wilayah

kritis. Untuk Wilayah Usulan Bogor Barat, wilayah yang termasuk ke dalam kategori wilayah potensial berjumlah enam kecamatan (30 persen), wilayah strategis berjumlah delapan kecamatan (40 persen), dan wilayah kritis berjumlah enam kecamatan (30 persen). Berdasarkan hasil analisis limpitan sejajar ini dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara potensi sumberdaya wilayah dengan ketersediaan

fasilitas sosial ekonomi. pada kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi sumberdaya yang besar terdapat fasilitas sosial ekonomi yang baik. Perbandingan wilayah prioritas pembangunan berdasarkan hasil analisis limpitan sejajar dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor ditunjukkan oleh Tabel 7.

Selanjutnya, pembangunan di setiap kecamatan harus disesuaikan dengan

Tabel 7. Wilayah Prioritas Pembangunan di Bogor Barat

Analisis Hirarki Potensi Sumberdaya	Analisis Hirarki Potensi Fasilitas Sosek	Sistim Limpitan Sejajar	Kebijakan Pemda Kabupaten Bogor
Wilayah Kaya: <ul style="list-style-type: none"> • Leuwiliang • Pamijahan • Cibungbulang • Ciampea • Rumpin • Cigudeg • Parung Panjang 	Wilayah Maju: <ul style="list-style-type: none"> • Leuwiliang 	Wilayah Potensial: <ul style="list-style-type: none"> • Leuwiliang • Pamijahan • Cibungbulang • Ciampea • Rumpin • Cigudeg 	Sistem Kota-kota: <ul style="list-style-type: none"> • Kota Hirarki II: <ul style="list-style-type: none"> - Leuwiliang - Jasinga • Kota Hirarki III: <ul style="list-style-type: none"> - Tenjo • Kota Hirarki IV: <ul style="list-style-type: none"> - Cigudeg - Nanggung - Pamijahan - Cibungbulang • Kota Pusat pelayanan Pedesaan: <ul style="list-style-type: none"> - Ciampea - Tenjolaya - Leuwisadeng - Rumpin - Parung Panjang Pusat Pertumbuhan Pedesaan: <ul style="list-style-type: none"> - Leuwisadeng - Rumpin - Parung Panjang
Wilayah Sedang: <ul style="list-style-type: none"> • Nanggung • Sukajaya • Jasinga • Dramaga* • Ciomas* • Kemang* • Parung* • Ciseeng* • Gunung Sindur* 	Wilayah Berkembang: <ul style="list-style-type: none"> • Nanggung • Pamijahan • Cibungbulang • Ciampea • Rumpin • Cigudeg • Jasinga • Parung Panjang • Dramaga* • Ciomas* • Kemang* • Parung* 	Wilayah Strategis: <ul style="list-style-type: none"> • Nanggung • Jasinga • Parung panjang • Dramaga* • Ciomas* • Kemang* • Parung* • Gunung Sindur* 	
Wilayah Miskin: <ul style="list-style-type: none"> • Leuwisadeng • Tenjolaya • Tenjo • Rancabungur* 	Wilayah Tertinggal: <ul style="list-style-type: none"> • Leuwisadeng • Tenjolaya • Sukajaya • Tenjo • Rancabungur* • Ciseeng* • Gunung Sindur* 	Wilayah Kritis: <ul style="list-style-type: none"> • Leuwisadeng • Tenjolaya • Sukajaya • Tenjo • Rancabungur* • Ciseeng* 	

Ket: * = termasuk ke dalam Wilayah Pembangunan Bogor Tengah tetapi diusulkan untuk menjadi Wilayah Bogor Barat

potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dilakukan analisis potensi yang terdapat pada masing-masing kecamatan. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui sektor yang perlu mendapat prioritas pengembangan di kecamatan yang bersangkutan. Tabel 8 menunjukkan kebijakan pembangunan wilayah di masing-masing kecamatan di wilayah Bogor Barat berdasarkan analisis hirarki potensi sumberdaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1) Secara umum Wilayah Bogor Barat mempunyai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai penggerak ekonomi dalam pembangunan, yaitu pada: (1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; dan (2) sektor pertambangan dan penggalian karena memiliki keunggulan nilai kontribusi dalam perbandingan antarwilayah sehingga layak untuk terus dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian lokal Wilayah Pembangunan Bogor Barat. Pengembangan potensi ekonomi tersebut terkait dengan keberadaan pusat pertumbuhan dan pelayanan yang masih terakumulasi di daerah perkotaan seperti Leuwiliang, Cibungbulang, Ciampea serta Ciomas dan Kemang. Hal tersebut menyebabkan daerah pedesaan relatif mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Akibatnya, karena intensitas keterkaitan antara daerah-daerah perkotaan dan pedesaan terbatas maka kesenjangan pun terjadi.

2) Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, Wilayah Bogor Barat dalam pembangunan ekonominya menekankan pada strategi yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal (Strategi W-O).

Hasil analisis matriks IFE menunjukkan bahwa Wilayah Bogor Barat masih memiliki kondisi internal yang lemah, yaitu belum mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan. Kekuatan utama yang dimiliki Bogor Barat adalah potensi sumberdaya alam yang besar sedangkan kelemahan utama yang dihadapi adalah masih lemahnya jejaring usaha yang berbasis pelaku usaha sehingga sektor perindustrian dan perdagangan di wilayah tersebut masih belum berkembang dan terdapatnya disparitas pembangunan.

Hasil analisis EFE menunjukkan bahwa Wilayah Bogor Barat telah mampu memanfaatkan peluang eksternal untuk menghadapi ancaman. Peluang terbesar yang dimiliki adalah adanya kebijakan Pemda Kabupaten Bogor dan kondisi perekonomian yang semakin membaik yang didominasi oleh sektor perindustrian; perdagangan, hotel dan restoran; dan pertanian. Selanjutnya, ancaman terbesar yang dihadapi adalah adanya persepsi ekonomi biaya tinggi dan persaingan antar daerah. Prioritas strategi yang terpilih diantaranya:

- a) Pengembangan industri yang menunjang aspek pertanian (agroindustri) sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor (kondisi perekonomian, kebijakan Pemda Kab.Bogor, letak geografis) serta kerjasama dengan pihak swasta/lainnya.

Tabel 8. Kebijakan Pembangunan Wilayah Kecamatan di Wilayah Bogor Barat

No.	Kecamatan	Kebijakan Berdasarkan Analisis Potensi Sumberdaya wilayah	
		Perbandingan Potensi Kecamatan Per sektor Perekonomian	Perbandingan Sektor Perekonomian Unggulan Per Kecamatan
1.	Nanggung	Kehutanan dan Perkebunan, Pariwisata	Kehutanan, Pariwisata, Perkebunan, Pertambangan
2.	Leuwiliang	Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan, Pariwisata, Perdagangan	Kehutanan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan
3.	Leuwi Sadeng	Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan	Peternakan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan
4.	Pamijahan	Pariwisata, Perikanan, Peternakan, Pertanian	Perikanan, Pariwisata, Peternakan, Pertanian
5.	Cibungbulang	Perikanan, Pertanian, Peternakan	Perikanan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan
6.	Ciampea	Perikanan, Perindustrian	Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Perdagangan
7.	Tenjolaya	Pertanian	Pertanian, Pariwisata, Kehutanan, Perkebunan
8.	Rumpin	Pertambangan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan	Pertambangan, Kehutanan, Peternakan, Perkebunan
9.	Cigudeg	Pertambangan, Pertanian	Pertambangan, Kehutanan, Pertanian, Pariwisata
10.	Sukajaya	Kehutanan dan Perkebunan	Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan
11.	Jasinga	Kehutanan dan Perkebunan	Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Pertanian
12.	Tenjo	Pertanian	Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perkebunan
13.	Parung Panjang	Peternakan, Pertambangan, Perindustrian	Pariwisata, Pertambangan, Peternakan, Pertanian
14.	Dramaga	Perindustrian, Perikanan	Perdagangan, Peternakan, Perindustrian, Pariwisata
15.	Ciomas	Perindustrian, Perdagangan	Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Peternakan
16.	Kemang	Peternakan, Pertanian	Peternakan, Perdagangan, Pertanian, Perindustrian
17.	Rancabungur	Kehutanan dan Perkebunan	Perkebunan, Peternakan, Pertanian, Perikanan
18.	Parung	Perikanan, Perdagangan, Peternakan	Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Pariwisata
19.	Ciseeng	Perikanan, Peternakan	Perikanan, Peternakan, Pertanian, Pertambangan
20.	Gunung Sindur	Peternakan, Perikanan	Peternakan, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan

b) Menemukan dan mempromosikan citra komoditi dan produk unggulan daerah sehingga memberikan nilai tambah (PDRB dan PAD) bagi masyarakat daerah dengan menggunakan kriteria

potensi nilai tambah langsung suatu komoditi/produk bagi keluarga miskin.
c) Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendukung daerah membangun dengan memperluas

kapasitas fiskal daerah dan memperluas basis produktif sektor ekonomi rakyat.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, beberapa saran yang dapat direkomendasikan antara lain:

- 1) Pembangunan ekonomi di Bogor Barat sebaiknya diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran; dan jasa-jasa sebagai sektor yang diprioritaskan.
- 2) Pemda Kabupaten Bogor seharusnya meningkatkan ketersediaan sarana prasarana khususnya di kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kurang seperti Leuwisadeng, Tenjolaya, Sukajaya, Tenjo, Rancabungur dan Ciseeng.
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebaiknya mengimplementasikan strategi yang direkomendasikan dari hasil kajian pembangunan daerah ini diantaranya strategi pengembangan industri yang menunjang aspek pertanian, strategi pengembangan citra komoditi dan produk unggulan daerah, serta strategi penciptaan iklim usaha yang kondusif.
- 4) Kaitannya dengan rencana pemekaran wilayah, Wilayah Pembangunan Bogor Barat maupun Wilayah Bogor Barat yang diusulkan dari segi jumlah sudah substansial dengan potensi sumberdaya yang besar. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Bogor untuk mengelola Bogor Barat diharapkan dapat menyeimbangkan ketimpangan yang terjadi jika dibandingkan Bogor Barat

tetap berada dalam kewenangan Kabupaten Bogor.

- 5) Penelitian mengenai pembangunan di Bogor Barat selanjutnya sebaiknya diarahkan pada aspek sosial, budaya, politik, tata ruang wilayah ataupun dari aspek anggaran pembangunan dan kebijakan. Selanjutnya analisis sektor basis sebaiknya dilakukan pada unit kecamatan sehingga dapat diketahui sektor unggulan per kecamatan berdasarkan data pendapatan (PDRB) per kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. 2006. *Kabupaten Bogor dalam Angka 2004/2005*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. 2005. *PDRB Kabupaten Bogor menurut Penggunaan Tahun 2004*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Bappeda Kabupaten Bogor. 2006. *PDRB Kabupaten Bogor per Wilbang Menurut Lapangan Usaha 2005*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Bappeda Kabupaten Bogor. 2005. *Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan kabupaten Bogor (Laporan Akhir)*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Bappeda Kabupaten Bogor. (Unpub). *Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2004 dan 2005*. Pemerintah Kabupaten Bogor
- Bappenas. 2006. *PP No 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007: Bab 25 – Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

- Biro Pusat Statistik. 2002. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- David, Fred R. 2006. *Strategic Manajement: Concepts and Cases, 10th Ed.* Pearson Education – Prentice Hall. New Jersey.
- Departemen Dalam Negeri RI. 2004. *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. Fokusmedia. Bandung.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. 2006. *Profil Wisata Kabupaten Bogor*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor. (Unpub). *Data Sarana Perdagangan, Pusat Keramaian dan Produk Daerah per Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2006*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (Unpub). *Data SIUP per Kecamatan Tahun 2005*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor. (Unpub). *Produksi Bahan Galian Golongan C per Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2004-2006*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor. (Unpub). *Perizinan Pertambangan Umum dan Migas Kabupaten Bogor*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. 2006. *Monografi Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2005*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. 2006. *Buku Saku Peternakan dan Perikanan Tahun 2005*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. 2005. *Ketentuan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Antara UU No.22 Tahun 1999 dengan UU no.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Departemen dalam Negeri. Jakarta.
- Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor. 2006. *Data Potensi KUKM Kabupaten Bogor Tahun 2006*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat. 2005. *Usulan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat melalui Pemekaran Kabupaten Bogor*. KPPKBB. Bogor.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. 2003. *Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Bogor Tahun 2003 – 2008*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Pemerintah Propinsi Jawa Barat. 2004. *Draft Juklak Penataan Derah Otonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
- Preer, Robert. W. (n.d.). *The Emergence of Technopolis: Knowledge – Intensive Technologies and Regional Development*. Praeger. Newyork.
- Tripomo, Tedjo dan Udan. 2005. *Manajemen Strategi*. Rekayasa Sains. Bandung.

